



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan***  
**Bank Sampah di Kabupaten Bandung**

Skripsi

Oleh

Hanna Fauziah

2014310035

**Bandung**

**2018**



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

***Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan  
Bank Sampah di Kabupaten Bandung***

Skripsi

Oleh

Hanna Fauziah

2014310035

Pembimbing

Tutik Rachmawati, S.IP., MA. Ph.D

**Bandung**

**2018**



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Hanna Fauziah  
Nomor Pokok : 2014310035  
Judul : Analisis *Collaborative Governance* dalam  
Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 26 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

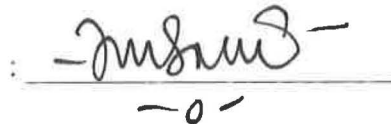
**Ketua Sidang merangkap anggota**  
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

: 

**Sekretaris**  
Tutik Rachmawati, S.IP., M.A., Ph.D

: 

**Anggota**  
Dr. Indraswari, M.A

:   
- 0 -

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanna Fauziah  
NPM : 2014310035  
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Analisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 08 Agustus 2018



Hanna Fauziah

## ABSTRAK

Nama : Hanna Fauziah

NPM : 2014310035

Judul : “ Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung”

---

*Collaborative Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang memiliki hubungan kerjasama antara *stakeholders* yaitu Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan adalah permasalahan mengenai sampah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah adalah membuat kebijakan mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar permasalahan sampah bisa terselesaikan dari akarnya. Maka, dibutuhkan kerja sama atau kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat salah satunya diwujudkan dalam program pengelolaan bank sampah. Kerjasama atau kolaborasi antara *stakeholders* dibuat untuk agar program bank sampah ini bisa berjalan dengan optimal dan berhasil mencapai tujuannya untuk mengatasi permasalahan mengenai sampah. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor- faktor keberhasilan kolaborasi yang perlu di tingkatkan dalam pengelolaan bank sampah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi dilapangan. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Bandung, dengan mengambil beberapa sampel bank sampah yang peneliti ambil berdasarkan teknik purposive sampel. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi dan juga studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif. Untuk mengecek keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, dimana triangulasi tersebut mengecek beberapa sumber data seperti hasil wawancara, hasil observasi, dan juga dokumentasi, selalu itu mengecek kepada beberapa narasumber yang memiliki perbedaan perspektif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam pengelolaan bank sampah masih belum berhasil, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang belum optimal dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Faktor- faktor yang masih harus ditingkatkan antara lain faktor Komunikasi, Pembuatan Keputusan Konsensus, Tujuan, Kepemimpinan, pembagian sumber daya, dan modal sosial pada isu kepercayaan.

**Keyword:** *Collaborative Governance, Stakeholders, Pengelolaan Bank Sampah*

## ABSTRACT

Name : Hanna Fauziah

NPM : 2014310035

Title : “ *Analysis Collaborative Governance for Waste Bank Management in Kabupaten Bandung*”

---

*Collaborative Governance is a governance that has a relationship with stakeholders , there are a collaboration between stakeholders, the stakeholder is the Government, Private Parties, and Society where this collaboration will able to find solutions to various problems that are difficult to solve. One problem that is difficult to solve is the issue of waste. The government's effort to overcome the waste problem is to create a policy on community-based waste management so that the waste problem can be solved from root. Thus, cooperation or collaboration is needed by the stakeholders in this community-based waste management. Collaboration conducted by stakeholders in community-based waste management one of which is realized in the waste bank management program. Cooperation or collaboration between stakeholders is made to ensure that this garbage bank program can run optimally and succeed in reaching its goal to overcome the problem of garbage. Based on that, the purpose of this research is to see the success factors of collaboration that need to be improved in the management of waste bank.*

*The research method used in this research is Qualitative method. This researchers trying to describe and explain the phenomena that occur in the field. Location of this research is Regency of Bandung, by taking some sample of garbage bank which researcher take based on purposive sampling technique. Data collection techniques conducted in this study are in-depth interviews, observations and also documentation studies. The data analysis technique used is using descriptive analysis technique. To check the validity and validity of the data in this study, the researcher used the triangulation technique of the data source, where triangulation checks several data sources such as interviews, observation results, and documentation, always checks with some speakers who have different perspectives.*

*The result of this research is Collaborative Governance in the management of waste bank is still not successful, this is because there are some factors that have not optimal in management of waste bank in Bandung regency. Factors still need to be improved include Communication factors, Consensus Decision Making, Goals, Leadership, resource sharing, and social capital on issues of trust.*

**Keyword: Collaborative Governance, Stakeholders, Waste Bank Management**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia Nya penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisa *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang peneliti hadapi, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran semua pihak akhirnya peneliti bisa melewati setiap hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kesalahan. Maka setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan pembelajaran serta nasihat dan saran yang penulis terima dari Dosen pembimbing, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing terkasih yaitu Ibu Tutik Rachmawati S.I.P., M.A., Ph.d, sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini agar menjadi skripsi yang



baik dan benar serta membantu penulis untuk bisa lebih memahami mengenai faktor keberhasilan *Collaborative Governance*.

Pada kesempatan kali ini juga tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua penulis, Bapak tercinta Achmad Rizky Nugraha dan Mamah tercinta Rimayanti Dania Roswati, terimakasih kepada Bapak dan Mamah yang selalu mendoakan, memberi kasih sayang serta semangat, memberi dukungan moral maupun materil dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, dan selalu menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dalam kesempatan ini pula , penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo,M.SI selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Poilitik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Deny.M.Triadi selaku dosen pembimbing penulis sewaktu seminar.
4. Ibu Indraswari, Ibu Ani Susana, Ibu Gina Ningsih, Bapak Dudung, Bapak Pius Sugeng Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ibu Maria, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Pius Suratman, Bapak Meindy dan segenap Dosen pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

5. Kepada Pak Asep Kusumah Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis, beserta Sekertaris bidang pengelolaan sampah Ibu Febby terimakasih telah memberikan akses kepada penulis untuk pengambilan data dokumen yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak John Samual Ketua Bank Sampah Bersinar yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis.
7. Bapak Dedi, Bapak Ade, Ibu In, Ibu Fety, Ibu Minah, Ibu Linda, dan semua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penelitian penulis.
8. Adik tercinta Yoga dan Zaki yang telah mendukung dan menghibur penulis.
9. Rizky Rimbawan Rachmat yang selalu menemani, menghibur dan mendukung penulis.
10. Para Sahabat Bulan Kancanawangi, Inia Arjani, Fidia Azizia, Arina Marsha, Wynni Noveria yang selalu menemani , mendukung, dan menghibur penulis selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
11. Teman seperjuangan dan seperbimbingan Rianti Kamalia, Genta Maulidina, Agatha Risky, Cyril Reyhandi dan Febriandi Naiborhu yang selalu bersedia membantu dan memberi masukan , serta diajak bertukar pikiran ,gagasan, dalm penulisan skripsi ini .

12. Kepada keluarga kedua, teman hidup selama 40 hari di kkl terimakasih untuk Thalia Rachmadiani, Sendy Septianilista, Thomas Galang, dan M Giarenza, yang telah memberikan pengalaman berharga sewaktu KKL.
13. Seluruh teman seangkatan 2014 yang sudah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan.
14. Terimakasih kepada teman masa kecil penulis Ratna nur Syifa, Nita Nurani, Arini Widi Utami, yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis.
15. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah SWT akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 12 Juli 2018

Hanna Fauziah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	19
1.3 Rumusan Pertanyaan .....	22
1.4 Tujuan penelitian .....	22
1.5 Kegunaan Penelitian .....	23
BAB II.....	24
Kerangka Teori .....	24
2.1 <i>Collaborative governance</i> .....	24
2.1.1 Definisi <i>Collaborative governance</i> .....	27
2.2 Tipe <i>Collaborative governance</i> .....	33
2.3 Manfaat <i>Collaborative governance</i> .....	35
2.4 Proses <i>Collaborative governance</i> .....	37
2.5 Pengukuran keberhasilan <i>Collaborative governance</i> .....	42
2.6 Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bandung. 62	
2.6.1 Jenis Program Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat .....	64
2.7 Model Penelitian.....	68
BAB III .....	69

Metode Penelitian .....	69
3.1 Tipe Penelitian .....	69
3.2 Peran Peneliti .....	72
3.3 Lokasi Penelitian .....	72
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	75
3.5 Sumber Data .....	87
3.6 Prosedur Pengumpulan Data.....	89
3.7 Analisis Data.....	93
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan .....	95
BAB IV .....	97
Profil Penelitian .....	97
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung .....	97
4.1.1 Kondisi Geografis .....	97
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung.....	97
4.2 Bank sampah di Kabupaten Bandung .....	98
4.2.1 Sejarah Berdirinya Bank Sampah di Kabupaten Bandung.....	99
4.2.2 Perkembangan Bank Sampah di Kabupaten Bandung .....	100
4.2.3 Kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan bank sampah.....	102
4.3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung .....	103
4.3.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup .....	103
4.3.2 Pelaksanaan Program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	104
4.4 Bank Sampah Bersinar .....	105
4.4.1 Gambaran Umum.....	105
4.4.2 Visi dan Tujuan.....	107
4.5 Bank Sampah di Kabupaten Bandung .....	109
4.6 Mekanisme Bank Sampah .....	116
BAB V .....	119
Pembahasan.....	119
5.1 Gambaran Umum.....	122

5.2 Faktor – Faktor Keberhasilan dalam <i>Collaborative governance</i> .....	124
5.2.1 <i>Communication</i> .....	125
5.2.2 <i>Concensus Decision Making</i> .....	134
5.2.3 <i>Diverse Stakeholders</i> .....	144
5.2.4 <i>Goal and Shared Vision</i> .....	157
5.2.5 <i>Leadership</i> .....	162
5.2.6 <i>Shared Resources</i> .....	172
5.2.7 <i>Social Capital</i> .....	180
BAB VI.....	190
Kesimpulan dan Saran .....	190
6.1 Kesimpulan .....	190
6.2 Saran .....	205
Daftar Pustaka.....	209
Lampiran I.....	216

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Dan Lokasi Bank Sampah.....	74
Tabel 4.1 Bank Sampah Kecamatan Baleendah.....	109
Tabel 4.2 Bank Sampah Kecamatan Bojongsoang.....	110
Tabel 4.3 Bank Sampah Kecamatan Banjaran.....	110
Tabel 4.4 Bank Sampah kecamatan Pameungpeuk.....	110
Tabel 4.5 Bank Sampah Kecamatan Kutawaringin.....	111
Tabel 4.6 Bank Sampah kecamatan Soreang.....	111
Tabel 4.7 Bank Sampah Kecamatan Katapang.....	111
Tabel 4.8 Bank Sampah Kecamatan Margahayu.....	112
Tabel 4.9 Bank Sampah Kecamatan Pangalengan.....	112
Tabel 4.10 Bank Sampah Kecamatan Cimaung.....	113
Tabel 4.11 Bank Sampah Kecamatan Pasir Jambu.....	113
Tabel 4.12 Bank Sampah Kecamatan Ciwidey.....	114
Tabel 4.13 Bank Sampah Kecamatan Majalaya.....	114
Tabel 4.14 Bank Sampah Kecamatan Paseh.....	114
Tabel 4.15 Bank Sampah Kecamatan Cileunyi.....	115
Tabel 4.16 Bank Sampah Kecamatan Ibum.....	115
Tabel 4.17 Bank Sampah Kecamatan Pacet.....	115
Tabel 5.1 Informan Dinas Lingkungan Hidup.....	121
Tabel 5.2 Informan Pihak Bank Sampah Bersinar.....	121
Tabel 5.3 Informan Perwakilan Masyarakat.....	121

Tabel 5.4 Jumlah Kehadiran anggota dalam forum.....	129
Tabel 5.5 Peran Stakeholders.....	151
Tabel 5.6 Sumber daya manusia.....	179



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Collaborative Assesment.....	38
Gambar 2.2 Model penelitian.....	68
Gambar 4.1 Mekanisme Bank Sampah BSB.....	117
Gambar 4.2 Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah.....	118
Gambar 5.1 Diagram Persentase Narasumber yang hadir.....	131
Gambar 5.2 Diagram Persentase Persetujuan kepekatan kebijakan.....	144
Gambar 5.3 Latar belakang Stakeholders.....	148
Gambar 5.4 Diagram Tujuan dan Visi Bersama.....	159
Gambar 5.5 Diagram persentase kepemimpinan.....	165
Gambar 5.6 Diagram Persentase Pendanaan.....	174
Gambar 5.7 Diagram Persentase TPST.....	175
Gambar 5.8 Bank Sampah yang direvitalisasi.....	176
Gambar 5.9 Diagram persentase Penyediaan alat angkut.....	177
Gambar 5.10 Diagram Persentase Penyediaan Barang.....	178
Gambar 5.11 Diagram Persentase Penyediaan Teknologi.....	178

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Collaborative governance* lahir seiring dengan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dari *Government* menuju *Governance*. Dalam konsep *Governance* pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan publik sendiri, namun dapat melibatkan peran serta pihak lain atau organisasi non pemerintah untuk meningkatkan kepuasan layanan masyarakat melalui kebijakan. Selain itu, karena kini semakin banyak tuntutan dan juga permasalahan yang kian kompleks, maka pemerintah juga perlu untuk melibatkan masyarakat didalam kebijakan pemerintah. Dalam kata lain, *collaborative governance* hadir untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan yaitu sektor publik, privat, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. keterlibatan sektor publik (pemerintah) dengan *privat* dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan membuat sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam *collaborative governance* dapat disebut juga dengan kolaborasi. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan

manfaat.<sup>1</sup>. Definisi lain dari kolaborasi pemerintah menurut O'flyn dan Wanna adalah sebagai berikut :

*“Collaboration means joint working or working in conjunction with others. It implies actors—individuals, groups or organisations—cooperating in some endeavour.”*<sup>2</sup>

Maksud dari definisi tersebut yaitu Kolaborasi berarti kerja sama atau bekerja sama dengan orang lain. Dimana aktor individu, kelompok atau organisasi bekerja sama dalam beberapa usaha. Sehingga *collaborative governance* merupakan bentuk kerja sama, saling berkompromi, baik secara langsung atau pun tidak langsung yang melibatkan lembaga pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat, dimana aktor – aktor yang berkolaborasi tersebut akan mendapatkan akibat dan manfaat dari suatu kolaborasi dan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam prakteknya sudah banyak negara maju yang menerapkan konsep *collaborative governance*, karena negara tersebut menganggap *collaborative governance* penting untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang terus menerus ada dan sulit untuk diselesaikan sendiri. Masalah seperti ini adalah masalah yang dinamis dan kompleks sehingga tidak ada solusi yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa ahli seperti Innes dan Booher, Healey, serta

---

<sup>1</sup>N. Haryono, 'Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th IV. No. 1. Dalam jurnal 'collaborative governance studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya ', D. Irawan. Kebijakan Manajemen Publik: vol 5 no 3 (2012)

<sup>2</sup>J. O'Flynn,dan J.Wanna, *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia*. (Australia: E Press,2008) hal 3.

Gunton dan Day mengemukakan perencanaan kolaboratif sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara misalnya untuk mengatasi kasus-kasus lingkungan, keamanan, pengelolaan air yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan lintas daerah administratif.<sup>3</sup>

Salah satu permasalahan yang terus menerus terjadi adalah permasalahan lingkungan mengenai pengelolaan sampah . Permasalahan pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja tetapi semua pihak perlu ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah kompleks yang membutuhkan penanganan dengan cara kolaborasi khususnya untuk negara – negara berkembang. Karena permasalahan sampah pada negara – negara tersebut setiap tahunnya semakin meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah yang cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia Sampah merupakan permasalahan yang selalu menjadi perhatian penting. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa total sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta m<sup>2</sup> ton per tahun.<sup>4</sup> Hal ini terjadi akibat meningkatnya aktivitas masyarakat.

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Total Sampah di Indonesia mencapai triliun ", <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 09 september 2017 pukul 15.30

Definisi sampah adalah sisa kegiatan yang dilakukan sehari-hari manusia dan/atau proses dari alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik dan anorganik, yang mana sampah tersebut ada yang bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai. Sampah yang bersifat tidak dapat diurai ini dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan yang dinamakan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik”.<sup>5</sup>

Undang-undang No.18 Tahun 2008 dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Didalam Undang –undang tersebut dijelaskan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional dan membutuhkan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>6</sup>Pengelolaansampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Selain UU No. 18 tahun 2008 yang mengatur soal pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya mewajibkan Pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Dalam Peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini, yaitu: (1) memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia; (2)memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh pihak yang

---

<sup>5</sup>Undang-Undang RI No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>6</sup>Undang – undang RI no 18 tahun 2008 pasal 1

terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat; (3) memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan sampah tersebut, bahwa salah satu landasan pokok pengelolaan sampah adalah adanya pembagian tugas dan peran seluruh pihak dalam pengelolaan sampah, dimana pihak – pihak yang terlibat adalah<sup>8</sup> :

1. Pemerintah ( kementrian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota ).
2. Pihak non pemerintah ( Dunia usaha/ lembaga privat, pengelola kawasan).
3. Masyarakat.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu menerapkan prinsip *collaborative governance*, karena pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang menjadi kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Ciri praktek *collaborative governance* diterapkan dalam kebijakan peraturan pengelolaan sampah pemerintah daerah. Salah satunya adalah

---

<sup>7</sup>Peraturan pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga” <http://www.menlh.go.id>., diakses tanggal 09 September 2017 pukul 20.39

<sup>8</sup>ibid

kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bandung, dimana didalam motto kerja pemerintahan daerah ini adalah Komitmen dan Kolaborasi.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan peningkatan penduduk yang terjadi setiap tahunnya, peningkatan penduduk ini berpengaruh terhadap volume sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah yang terdapat di kabupaten Bandung meliputi sampah rumah tangga, organik dan anorganik. Penanganan sampah di Kabupaten Bandung diakui menjadi salah satu persoalan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (AK) mengatakan bahwa<sup>9</sup> :

*“ Dalam satu hari masyarakat menghasilkan 7 juta liter atau 1.750 ton sampah. Terkait hal tersebut pihak kami memberikan perhatian ke sejumlah titik, khususnya di wilayah urban. Kabupaten Bandung memiliki 150 titik pembuangan sampah liar. Kami pun sudah membentuk unit reaksi cepat. Namun titik sampah liar bertambah sehingga tugas unit reaksi cepat yang seharusnya menangani hal-hal yang insidental malah lebih rutin daripada yang reguler”*

Selain itu, Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung menyatakan bahwa 3,6 juta penduduk di Kabupaten Bandung setiap harinya menghasilkan 0,5 hingga 0,4 kilogram sampah setiap harinya. Jika dihitung maka

---

<sup>9</sup>“ Kabupaten Bandung Hasilkan 1750 ton sampah setiap hari “ <http://www.prfmnews.com>, diakses tanggal 09 September 2017 pukul 20.55

masyarakat Kabupaten Bandung menghasilkan 43.200 ton sampah setiap bulannya.<sup>10</sup>

Semua sumber sampah di kabupaten bandung diklasifikan menjadi beberapa yaitu ;

1. Pemukiman
2. Institusi
3. Pasar
4. Komersial
5. Dan lain – lain

Berdasarkan data, sumber sampah yang berasal dari pemukiman merupakan sumber sampah yang tertinggi hampir mencapai 60% sisanya institusi 10%, pasar 5 %, dan 25 %nya adalah jenis sampah komersial dan lainnya.<sup>11</sup> Maka dari itu permasalahan sampah yang terjadi harus diselesaikan dulu dari sumber sampah terbanyak. Karena pemukiman atau masyarakat menyumbang angka sampah terbanyak. Maka pemerintah Kabupaten Bandung harus menyelesaikan permasalahan sampah yang bersumber dari masyarakat.

Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung memerlukan penyelesaian segera karena semakin hari volume sampah semakin meningkat, tertumpuknya sampah karena tidak terangkut dan tidak tertangani. Hal tersebut terjadi kondisi

---

<sup>10</sup>“Pemkab Bandung wajibkan warganya menangani sampah rumah tangga berwawasan lingkungan” <http://jabar.tribunnews.com/2017/12/26/>, diakses tanggal 25- 01 – 2017 pukul 20.20

<sup>11</sup>Dokumen Dinas Lingkungan Hidup tentang perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung diakses tanggal 28 Februari 2018



TPA yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh sampah dan membuat masyarakat lebih memilih membuang sampah di titik liar bahkan sampai ke sungai citarum.

Dengan mempertimbangkan hal diatas, maka dibutuhkan solusi yang inovatif dalam mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh masyarakat. Masyarakat merupakan penghasil utama sampah, karena itu masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah, yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan sampah untuk lingkungannya sendiri. Membangun kemandirian masyarakat ini dilakukan melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah, pihak swasta, dan aktor utama yaitu masyarakat.

Saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Bandung banyak melakukan inovasi dan perubahan didalam pengelolaan sampah hal ini dikarenakan visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yaitu Kabupaten Bandung bebas sampah 2020. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup membuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program pengelolaan sampah yang pastinya memberikan ruang bagi semua *stakeholders* untuk ikut berperan dan berpartisipasi dan menciptakan kolaborasi didalam setiap program-program pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini dibuat atas dasar keinginan pemerintah daerah kabupaten bandung untuk merubah mindset masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah hal yang merugikan tetapi, dengan program ini akan merubah mindset masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yaitu sumber daya organik (kehidupan), sumber daya energi

(biodigester), dan sumber daya ekonomi (nilai ekonomi tinggi). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan tujuan merubah mindset masyarakat tentang sampah ini mencirikan adanya *collaborative governance*. Menurut Anshel and gash (2008), *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan *secara langsung stakeholders di luar negara*, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. sehingga bisa disimpulkan ciri utama dalam *collaborative governance* adanya kolaborasi antar aktor-aktor yang berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil.

Terdapat dua penciri utama *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kabupaten Bandung. Berikut ini akan dibahas dua penciri utama *collaborative governance* tersebut.

Penciri utama pertama dari *collaborative governance* tersebut adalah (1) adanya *stakeholders* yang memiliki peran dan kewajiban masing – masing dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan adanya peran pemerintah. Peran masing-masing stakeholder telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung no 15 tahun 2012 yang mengatur bahwa setiap orang atau seluruh masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui cara sebagai berikut<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 15 tahun 2012 pasal 12 ayat 1

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. mengawasi dan mengorganisir diri;
- c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah;
- d. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelola sampah. Secara teknis tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah ditulis pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung<sup>13</sup> Selain itu, tugas pemerintah dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan instansi lain, dan juga pihak swasta, serta memenuhi sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah. Dengan kata lain pemerintah harus bisa memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan masyarakat bisa termotivasi untuk melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 15 tahun 2012 tersebut maka pihak swasta perlu ikut terlibat didalam pengelolaan sampah , sehingga pihak swasta mempunyai peran sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Bandung no 55 tahun 2013 pasal; 13

<sup>14</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Bandung no 25 tahun 2012 pasal; 20

1. Peran swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.
2. Bentuk kegiatan peran swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :
  - a) pola pembinaan dimana peran swasta hanya memberikan kontribusi dalam hal inovasi teknologi teknologi terapan;
  - b) pola bantuan langsung dimana peran swasta membantu sarana prasarana, inovasi teknologi dan pembinaan kepada masyarakat pengelola sampah;

Peraturan daerah No 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung tersebut mengamanatkan bawa semua pihak dapat bekerja sama dengan baik maka pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan berhasil dan mampu mengurangi volume sampah di Kabupaten Bandung.

Penciri utama kedua dari *collaborative governance* adalah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu Bank sampah, Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan kolaborasi dengan beberapa *stakeholders* , yaitu

1. Instansi lain; kecamatan, desa, RT/RW, TP PKK.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan pihak swasta salah satunya yang dijadikan induk bank sampah di Kabupaten Bandung yang dikelola langsung oleh pihak swasta..

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan kader lingkungan yaitu kader yang berasal dari masyarakat yang merupakan orang – orang yang peduli akan lingkungan atau dijadikan tokoh lingkungan. Lalu berkolaborasi dengan masyarakat sebagai pelaksana bank sampah,

Jadi, dalam pengelolaan Bank sampah di Kabupaten Bandung saling bersinergi antara Pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak swasta yaitu Bank Sampah Bersinar yang dijadikan sebagai bank sampah induk , dan Bank Sampah yang didirikan oleh masyarakat yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bandung berjumlah 175 yang terdata di kabupaten Bandung tahun 2017.<sup>15</sup>

Sebagian besar bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan merupakan bank sampah yang merupakan kelompok binaan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Bersinar, beberapa bank sampah juga didirikan secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga *stakeholders* terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembuat kebijakan serta pembina bank sampah, Bank Sampah Bersinar sebagai bank sampah induk yang dikelola oleh swasta di Kabupaten Bandung, dan Bank Sampah yang didirikan oleh masyarakat tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bandung.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sekbid persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 17 Mei 2018 pukul 11.00

Meskipun dua penciri utama dari *collaborative governance* telah teramati dalam indikasi awal penelitian ini fakta dilapangan membuktikan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung belum optimal. Menurut Huxam dan Herbert salah satu ukuran keberhasilan *collaborative governance* adalah tercapainya tujuan dari *collaborative governance* tersebut.<sup>16</sup>

Dengan berdasarkan pada pendapat tersebut maka saat ini *collaborative governance* yang dilakukan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bank Sampah Bersinar, dan Bank Sampah yang didirikan oleh masyarakat belum mencapai tujuannya. Tujuan adanya kolaborasi tersebut yaitu untuk mengurangi volume sampah dan merubah mindset masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya melalui bank sampah. Berikut ini akan dijelaskan bukti-bukti belum tercapainya tujuan *collaborative governance* tersebut:

- (1) Volume sampah yang masih tinggi.** Hal ini dibuktikan dari sumber berita online yaitu Republika yang memberikan informasi bahwa tumpukan sampah rumah tangga masih menumpuk di aliran anak sungai Citarum, Cikapundung. Lokasi tepatnya berada di Desa Bojongsoang RT 01 RW 01 Kampung Cipurut, Desa Bojongsoang hingga ke titik nol sungai Cikapundung yang berada di Babakan Leuwi Bandung, RW 02, Desa

---

<sup>16</sup>Huxam,C dan Paul herbert *Hit or myth? Stories of collaborative success* (2008), J, O'Flynn dan John W,*Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia* (hal 45) Australia: E Press.

Citireup Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan dari Republika Terdapat banyak tumpukan sampah ditemukan di beberapa tempat yang bermuara ke Sungai Citarum. Alhasil sungai Citarum lama yang tidak berfungsi di sekitar Desa Citireup penuh dengan sampah dan sedimentasi yang tinggi.<sup>17</sup>

**(2) Yang kedua masih kurangnya kesadaran masyarakat,** Menurut hasil wawancara dengan Camat di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. kendala penerapan bank sampah di kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

*“Dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah terus melakukan sosialisasi untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pihak kecamatan sendiri juga sudah memberi mandat kepada para kepala desa untuk menerapkan bank sampah di desanya.. kesadaran masyarakat masih rendah ini yang sangat menjadi kendala“*

Berdasarkan kedua bukti yang telah disebutkan maka penyebab belum tercapainya tujuan dari *collaborative governance* dalam program pengelolaan bank sampah adalah sebagai berikut:

**Pertama,** adanya kendala sulitnya menyatukan tujuan karena kepentingan yang berbeda Adanya kolaborasi dari berbagai pihak tentunya akan lebih membuat

---

<sup>17</sup> “Sampah masih menumpuk di sungai citarum “ , <http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 17 Februari 2018 pukul 17.04

kebijakan bank sampah ini menjadi lebih efektif tetapi dalam kenyatannya pengelolaan bank sampah ini masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini terjadi karena dalam membina bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta semua *stakeholders* sepakat bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat bertujuan untuk mengurangi sampah dan merubah mindset masyarakat, bahwa dalam pengelolaan sampah haruslah masyarakat sendiri yang terjun langsung untuk mengelola sampah. Menurut hasil wawancara dengan pihak swasta yang menjalankan bank sampah induk yaitu Bank Sampah Bersinar (BSB), dapat dipahami bahwa BSB ternyata memiliki tujuan dan misi yang berbeda dengan pemerintah. Tujuan dan misi Bank Sampah Bersinar lebih mengutamakan nilai ekonomis yang didapatkan dari pengelolaan sampah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 28 Februari 2018 :

*“ Sebetulnya untuk pengelolaan bank sampah, BSB (Bank Sampah Bersinar) ini sudah bagus dalam pelaksanaannya tetapi kembali lagi karena pihak tersebut dasarnya adalah swasta jadi tidak terlalu memikirkan dampak panjang apakah masyarakat sudah mengerti kewajiban pengelolaan sampah, jadi lebih kepada mendapatkan barang yang didapatkan dari masyarakat sehingga masyarakat berfikir tujuan utama dalam bank sampah adalah nilai ekonomis, tetapi yang diharapkan dan misi dari pemerintah sendiri adalah merubah mindset masyarakat bahwa sampah itu harus dikelola baik dari sampah organiknya melalui*



*LCO, dan sampah non organiknya melalui bank sampah yang harusnya masyarakat juga bisa memanfaatkan sampah tersebut . Sehingga akan mengurangi jumlah sampah pada sumbernya, kalau konsepnya hanya berdasarkan pada nilai ekonomis makatidak ada kesadaran akan pengelolaan sampah ”*

Penulis juga menemukan pernyataan yang membenarkan bahwa Bank Sampah Bersinar di Kabupaten Bandung memanfaatkan Bank Sampah sebagai sumber daya ekonomi.

*“SAMPAH kadung identik dengan kotor dan tak berguna. Keberadaannya pun dianggap sebagai masalah besar yang melahirkan bencana, mulai dari banjir sampai beragam penyakit. Namun itu pandangan lama. Sebuah pola pikir baru berusaha ditularkan Bank Sampah Bersinar. Lewat beragam cara, para penggiatnya berusaha menyadarkan masyarakat bahwa sampah pun bisa bermanfaat. Lebih dari itu, memiliki nilai ekonomi<sup>18</sup>”*

(Sumber : Pikiran Rakyat, 01 Maret 2018 )

**Kedua**, kurangnya peran aktif dari para stakeholders yang lainnya yaitu masyarakat sebagai pelakasna Bank sampah yaitu masyarakat yang membuat komunikasi dalam kolaborasi sulit dilakukan. Proses kolaborasi yang pertama

---

<sup>18</sup>“Bagi BSB Sampah Adalah berkah” <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/03/01/>, diakses pada 04 Maret 2018 pukul 15.33

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah membentuk sebuah forum. Namun pembentukan forum tersebut tidak maksimal dimanfaatkan karena kendala ketidak hadiran dari aktor yang terlibat. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup :

*“ Nanti pada awal maret saya akan mengadakan forum diskusi terkait pengembangan bank sampah di Kabupaten Bandung Ada sekitar 60 Bank Sampah yang saya undang untuk membicarakan rencana kami membangun bank sampah induk yang dikelola untuk kami sendiri, tetapi saya kurang yakin akan hadir semuanya atau tidak. Karena seperti yang sudah – sudah sebelumnya biasanya yang hadir itu tidak 100 % “*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari para aktor tidak maksimal (atau mencapai 100% kehadiran). Terdapat 60 bank sampah yang didirikan oleh masyarakat diundang langsung oleh dinas lingkungan hidup untuk dilakukan sebuah forum dalam kolaborasi pengelolaan bank sampah, tetapi banyak sekali perwakilan dari bank sampah yang tidak ikut. Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam memberikan dan menyebarkan informasi terkait kesepakatan dalam pelaksanaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Tanpa adanya pertemuan maka akan sulit untuk menerima kesepakatan dan akan menimbulkan kesalah pahaman.

Selain itu, ketidak hadiran dalam suatu forum salah satunya disebabkan kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam ikut terlibat aktif dalam pengelolaan

sampah hal ini sesuai dengan apa yang tercantum didalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada bagian evaluasi kerja tahun 2017<sup>19</sup> dijelaskan bahwa saat ini masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola persampahan skala rumah tangga, termasuk didalamnya adalah mengenai pengelolaan bank sampah, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat kurang terlibat didalam pengelolaan bank sampah.

**Ketiga**, kendala minimnya fasilitas dan sarana untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah tersebut. Menurut data hasil perolehan nilai pada adipura tahun 2016 Kabupaten Bandung masih harus merevitalisasi fasilitas pengelolaan sampah dikabupaten Bandung, salah satunya penyediaan sarana bank sampah.

Selain itu juga beberapa perwakilan bank sampah di Kabupaten Bandung merasa masih kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan bank sampah di Kabupaten Bandung. Salah satunya seperti yang tercantum pada proposal yang diajukan oleh Paguyuban bank sampah di kecamatan pangalengan yang didirikan oleh masyarakat, bahwa saat ini bank sampah tersebut masih kurang fasilitas adalah bank sampah di kecamatan pangalengan hal ini ditunjukan berdasarkan sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup terkait tempat pengelolaan bank sampah, mengenai alat teknologi pengelolaan sampah seperti pecacah kertas juga bangunan atau pojok edukasi untuk pengelolaan bank sampah.<sup>20</sup> Menurut hasil evaluasi rencana kerja tahun 2017 bahwa masih rendahnya rasio Tempat

---

<sup>19</sup> Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup 2018 diakses [www.bandungkab.go.id//](http://www.bandungkab.go.id//)

<sup>20</sup> Proposal paguyuban bank sampah pangalengan.

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan penduduk akibat kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah, yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan bank sampah,

Kesulitan pengadaan sarana dan prasarana tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakannya, karena sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam berkolaborasi. Berarti dalam kata lain kolaborasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik, tanpa adanya fasilitas maka tujuan dan permasalahan tidak akan terselesaikan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa penerapan *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah belum berhasil mencapai tujuannya yaitu mengurangi volume sampah dan merubah mindset masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya. Ketidak berhasilan dalam kolaborasi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor kolaborasi yang lemah diantara Stakeholders yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Bank Sampah Swasta yaitu Bank Sampah Bersinar yang dijadikan bank sampah induk, dan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat.

Ketidak berhasilan *collaborative governance* tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

1. Lemahnya komitmen *stakeholders* terhadap tujuan kolaborasi. Komitmen terhadap tujuan pada saat kolaborasi berlangsung merupakan hal yang penting, Dinas Lingkungan Hidup beserta *stakeholders* nya harus berkomitmen terhadap misi yang paling penting. Tetapi dalam komitmen ini muncul perbedaan pemahaman dan tujuan berdasarkan kepentingan masing – masing. Perbedaan pemahaman terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup terhadap Bank Sampah Bersinar yang ditunjuk untuk menjadi Bank Sampah Induk Kabupaten Bandung. Perbedaan pemahaman ini yang menyebabkan sulitnya mencapai tujuan kolaborasi meskipun perbedaan pemahaman bukanlah sesuatu yang negative.
2. Masalah Komunikasi dan peran *stakeholders*.
  - Terdapat permasalahan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan beberapa bank sampah di Kabupaten Bandung Komunikasi tentunya merupakan hal sangat penting untuk menyebarkan informasi. Dalam kolaborasi informasi ini harus bisa didapatkan oleh semua *stakeholders*. Tetapi masih ada kendala didalam penyampaian informasi tersebut. Yaitu adalah ketidak hadiran aktor yang terlibat didalam forum. Ketidak hadiran didalam forum akan membuat komunikasi menjadi kurang efektif, karena aktor akan sulit memahami isi dari kesepakatan yang dibuat. Padahal forum ini merupakan proses yang penting dalam kolaborasi untuk menyelesaikan masalah.

- Dan permasalahan peran aktif masyarakat sebagai yang melaksanakan bank sampah, bahwa sampai saat ini masyarakat masih kurang mengetahui tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

### 3. Penyediaan Fasilitas Sarana dan prasarana .

- Masih kurangnya fasilitas untuk memaksimalkan program bank sampah di kabupaten Bandung, Menurut data hasil perolehan nilai pada adipura tahun 2016 Kabupaten Bandung masih harus merevitalisasi fasilitas pengelolaan sampah di kabupaten Bandung, salah satunya penyediaan sarana bank sampah.
- Masih kurangnya Fasilitas untuk menunjang pengelolaan sampah di beberapa bank sampah salah satunya bank sampah di kecamatan pangalengan yaitu berupa alat teknologi dan tempat atau bangun untuk pengelolaan sampah ataupun pojok edukasi pada bank sampah yang dikelola oleh masyarakat yaitu paguyuban bank sampah kecamatan pangalengan Kabupaten Bandung .
- Masih rendahnya rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan penduduk akibat kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah, yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengelolaan bank sampah,

### **1.3 Rumusan Pertanyaan**

Berdasarkan indikasi permasalahan diatas maka bisa disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kabupaten Bandung masih belum berhasil. Dengan demikian rumusan pertanyaan penelitian ini adalah:

- Apa saja faktor - faktor dalam *collaborative governance* yang perlu diperkuat untuk meningkatkan penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di kabupaten Bandung ?

### **1.4 Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Menggambarkan penerapan *collaborative governance* yang ada dalam pengelolaan sampah di kabupaten bandung.
2. Mengetahui faktor faktor *collaborative governance* yang bisa diperkuat dalam mengoptimalisasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Bandung dalam meningkatkan program bank sampah dan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kabupaten Bandung.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kebijakan publik dalam pengelolaan lingkungan.